

IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DITINJAU DARI KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA JENJANG SMA DI KABUPATEN SIDOARJO

Pudji Wahyuni Alam

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiwahyunialam@gmail.com

Wiwik Sri Utami

Prodi S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis. Selama ini, sekolah hanya menyelenggarakan program akademik melalui pendekatan program paket semester. Pendekatan program paket semester tersebut sudah tidak efektif lagi, maka pemerintah mencoba menerapkan program pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk jenjang SMP dan SMA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Sidoarjo di 6 SMA Negeri yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Responden diambil sebanyak 126 responden yang meliputi 6 orang kepala sekolah, 24 orang guru, dan 96 orang siswa. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara *analisis deskriptif kuantitatif*.

Hasil penelitian tentang implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah baik. Hal ini ditunjukkan dari 6 Standar Nasional Pendidikan yang digunakan yaitu standar proses yang memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 82% dari 104 responden, karena perangkat pembelajaran sudah terpenuhi di semua kelas. Standar sarana dan prasarana memenuhi yang kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 68% dari 87 responden, karena sekolah sudah memenuhi standar ruang kelas dan ruang penunjang belajar. Standar pendidik yang memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 67% dari 20 responden, karena guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Standar biaya pendidikan yang memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 80% dari 22 responden, karena rancangan anggaran biaya pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dirumuskan merujuk pada peraturan pemerintah. Standar pengelolaan yang memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 60% dari 18 responden karena penyusunan perencanaan program sekolah berdasarkan kesepakatan bersama. Standar penilaian memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 87% dari 110 responden karena guru disekolah menggunakan berbagai jenis metode untuk menilai kemajuan peserta didik.

Kata Kunci: Sistem Kredit Semester, Standar Nasional Pendidikan

Abstract

Government Regulation No. 32 Year 2013 on National Education Standards (NSP) has brought a paradigm shift from the pattern of centralized education to be decentralized. During this time, the school only organizes the academic program through a program approach semester packed. Approach the semester program packages are no longer effective, the government tried to implement educational programs with Semester Credit System (SKS) for junior high school and senior high school. The purpose of this study is to investigate the implementation of Semester Credit System (SKS) in terms of the achievement of the National Education Standards (SNP) at the high school level in Sidoarjo.

The method used in this research is survey method. The research location in the district of Sidoarjo in 6 Senior High School who apply Semester Credit System (SKS). Respondents were drawn as many as 126 respondents covering 6 principals, 24 teachers and 96 students. This study uses data analysis techniques in *quantitative descriptive analysis*.

Results of research on the implementation of Semester Credit System (SKS) in terms of the achievement of the National Education Standards (SNP) on the ladder the senior high school in Sidoarjo is good. This is shown from 6 National Education Standards applied that standard processes that meet good criteria, by getting the highest grades of respondents that is 82% of the 104 respondents, as a

learning tool has been fulfilled in all classes. Standard facilities and infrastructure meet the criteria, by getting the highest score of the respondents is 68 % of 87 respondents, because schools already meet the standards of classroom and learning support room . Standard educators who meet good criteria, by getting the highest grades of respondents is 67 % of 20 respondents, because teachers have adequate qualification and competence. The standard cost of education that meets both criteria, by getting the highest value of the respondents is 80 % of 22 respondents, since the draft budget revenues school shopping (RAPBS) formulated refers to government regulations. Management standars that meet good criteria, by gettin the highest grades of respondents ie 60 % of 18 respondents, because of planning school program based on mutual agreement. Standard ratings meet good the criteria, by getting the highest grades of respondents is 87 % of the 110 respondents, because the teachers use variety of methods to assess learners progress .

Keywords : Semester Credit System , The National Education Standards

PENDAHULUAN

Pendidikan sejak dahulu sudah menjadi salah satu bentuk usaha manusia dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi kehidupan maupun budaya manusia itu sendiri, dengan kata lain pendidikan merupakan salah satu strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensinya. Seiring berjalannya waktu maupun dari tempat ke tempat dan dari teori ke teori yang lain, mengandung banyak gagasan, visi dan ideologi. Menurut Hamalik (2011: 3) pendidikan merupakan suatu proses dalam mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.

Era globalisasi tentunya menuntut setiap aspek teknologi, manajemen, maupun sumber daya manusia. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pendidikan bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah memiliki peranan yang penting didalam kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu didasarkan 8 (delapan) aspek Standart Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan pada PP 32 Tahun 2013 sebagai revisi PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Lebih jauh, globalisasi memang belum menunjukkan kecenderungan umum dibidang pendidikan, namun gejala kearah tersebut sudah mulai terlihat. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Sisdiknas, dan PP 32 Tahun 2013 sebagai revisi PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis.

Sekolah-sekolah atau satuan pendidikan berhak mengatur kurikulumnya sendiri yang dianggap sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Kurikulum pembelajaran jaman dulu berorientasi kepada guru (*Teacher Oriented*) yang didasarkan pada tingkat kemajuan sang guru, tetapi sekarang kurikulum didasarkan pada tingkat kemajuan siswa (*Student Oriented*). Menurut Baktiarso (2015: 225) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dicanangkan oleh

pemerintah tahun 2004 merupakan langkah awal pemerintah dalam mengikutsertakan secara aktif siswa terhadap pelajaran di kelas yang kemudian disusul dengan Kurikulum dengan Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dengan Sistem Kredit yang didasarkan pada tingkat satuan pendidikan. Kredit adalah ukuran/ satuan belajar siswa yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tatap muka dan pekerja rumah per minggu tiap semester.

Sistem Kredt Semester (SKS) ditujukan untuk mengakomodir berbagai perbedaan individual peserta didik, sehingga siswa dapat diberikan layanan yang optimal oleh sekolah dalam mengembangkan potensi dirinya dalam mempercepat proses studinya. Penyelenggaraan program SKS ini diharapkan akan dapat mengakomodir segala bentuk kemajemukan potensi peserta didik, dengan diselenggarakannya program SKS ini juga memungkinkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan. Program SKS ini masih menjadi hal baru dalam dunia pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah, sehingga pengimplementasian program SKS ini masih memunculkan banyak pertanyaan mulai dari bagaimana perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program hingga evaluasi program. Hal lain yang perlu dicermati dalam penerapan program SKS ini adalah sekolah perlu memberikan pelayanan yang ekstra kepada siswa seperti pelayanan administrasi, pelayanan instruksional dan pelayanan bantuan.

Pemberlakuan program SKS pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo ini bisa diartikan sebagai suatu inovasi pendidikan yang ditinjau untuk peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, namun seiring dengan diberlakukannya SKS ini banyak memunculkan spekulasi mengenai keberlangsungan program yang dilakukan pada jenjang SMA yang dinilai belum cocok diterapkan di Indonesia. Beberapa pengamat pendidikan juga melihat bahwa pemberlakuan SKS ini bertentangan dengan konsep otonomi sekolah dan manajemen berbasis sekolah, selain itu sekolah juga harus menyiapkan fasilitas yang cukup untuk dapat memberlakukan program SKS ini agar berjalan dengan lancar mulai dari tenaga pengajar, hingga kepada sarana dan prasarana di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian Standar

Nasional Pendidikan (SNP) pada Jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui kendala implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada SMA di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 14) deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mendiskripsikan serta mengidentifikasi masalah. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA di Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu SMA 1 Negeri Sidoarjo, SMA Negeri 2 Sidoarjo, SMA 3 Sidoarjo, SMA 1 Krembung, SMA 1 Krian, dan SMA 1 Taman. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2010: 203) instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuisioner. Pengumpulan data menggunakan angket dan observasi lapangan. Variabel yang digunakan adalah variabel standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik, standar biaya pendidikan, standar pengelolaan, dan standar penilaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar Proses Pada SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa jumlah responden kepala sekolah yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar proses di SMAN adalah 6 orang kepala sekolah atau 100%.

2. Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa jumlah responden guru yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten Sidoarjo menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana di SMAN adalah 24 guru atau 100%.

3. Siswa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden siswa yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar proses pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo adalah 5 orang siswa atau 5%, responden yang menyatakan sangat baik dalam ketercapaian standar proses pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo adalah 80 orang siswa atau 83%, responden yang menyatakan Kurang baik dalam Ketercapaian Standar Proses pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo, responden siswa yang menyatakan kurang baik dalam ketercapaian standar Proses Pada SMAN di Sidoarjo adalah 11 orang siswa atau 11%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut :

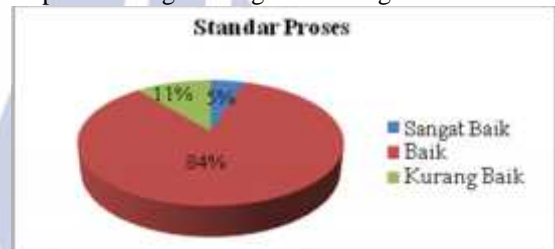


Diagram 3 Kesiapan Standar Proses Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Siswa.

B. Standar Sarana dan Prasaran Pada SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan sistem kredit semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden kepala sekolah yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana di SMAN adalah 1 orang kepala sekolah atau 17%, responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana di SMAN adalah 3 orang kepala sekolah atau 50%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana di SMAN adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:

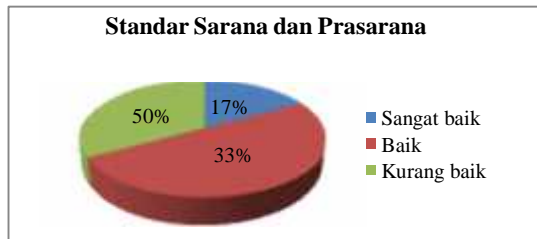


Diagram 4 Kesiapan Standar Sarana dan Prasarana Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Kepala Sekolah.



Diagram 6 Kesiapan Standar Sarana dan Prasarana Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden siswa.

2. Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden guru yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten di Sidoarjo adalah 15 orang guru atau 63%, responden guru yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana di SMAN adalah 9 orang guru atau 37%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 5 Kesiapan Standar Sarana dan Prasarana Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Guru

3. Siswa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden siswa yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di kabupaten di Sidoarjo adalah 6 orang siswa atau 6%, responden siswa yang menyatakan baik adalah 69 orang siswa atau 72%, responden siswa yang menyatakan kurang baik adalah 21 siswa atau 22%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:

C. Standar Pendidik Pada SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo.

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pendidik pada SMA di kabupaten di Sidoarjo adalah 4 orang kepala sekolah atau 67%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pendidik di SMAN adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 7 Kesiapan Standar Pendidik Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Kepala Sekolah.

2. Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden guru yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pendidik pada SMA di Kabupaten di Sidoarjo adalah 16 orang guru atau 67%, responden guru yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pendidik di SMAN adalah 8 orang guru atau 33%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 8 Kesiapan Standar Pendidik Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Guru.

D. Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo.

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar biaya pendidikan pada SMA di kabupaten di Sidoarjo adalah 4 orang kepala sekolah atau 67%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar biaya pendidikan di SMAN adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 9 Kesiapan standar biaya pendidikan Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo responden kepala sekolah.

2. Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden guru yang menyatakan baik implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian Standar Biaya Pendidikan pada SMA di kabupaten di Sidoarjo adalah 18 orang guru atau 75%, responden guru yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar biaya pendidikan di SMAN adalah 6 orang guru atau 25%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 10 Kesiapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Guru.

E. Standar Pengelolaan Pada SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo.

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden kepala sekolah yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMAN adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%, responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMAN adalah 3 orang kepala sekolah atau 50%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMAN adalah 1 orang kepala sekolah atau 17%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:

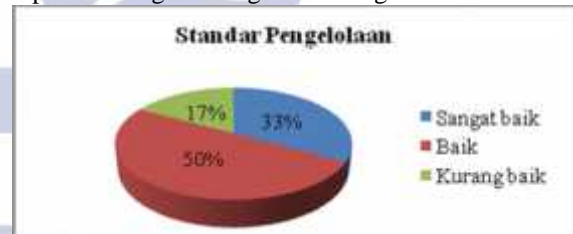


Diagram 11 Kesiapan Standar Pengelolaan Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Kepala Sekolah.

2. Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden guru yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMAN adalah 3 orang guru atau 12.5%, responden guru yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMAN adalah 15 orang guru atau 62.5%, responden guru yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMAN adalah 6 orang guru atau 25%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:

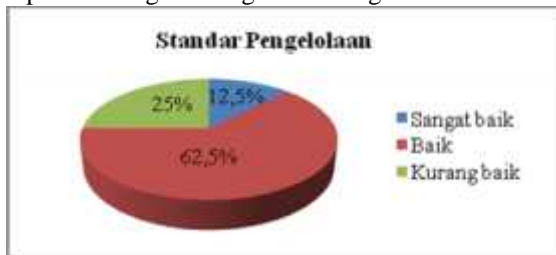


Diagram 12 Kesiapan standar pengelolaan Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo responden guru.



Diagram 13 Kesiapan standar penilaian Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Guru.

F. Standar Penilaian Pada SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo.

1. Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar penilaian di SMAN adalah 5 orang kepala sekolah atau 83%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar penilaian di SMAN adalah 1 orang kepala sekolah atau 17%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 13 Kesiapan standar penilaian Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Responden Kepala Sekolah.

2. Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden guru yang menyatakan baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester ditinjau dari ketercapaian standar penilaian pada SMAN di Kabupaten adalah 19 orang guru atau 79%, responden guru yang menyatakan kurang baik dalam ketercapaian standar penilaian pada SMAN di Kabupaten adalah 5 orang guru atau 21%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:

3. Siswa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni 6 sekolah SMAN yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Responden siswa yang menyatakan sangat baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar penilaian di SMAN adalah 4 orang siswa atau 4%, responden siswa yang menyatakan baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar nilai di SMAN adalah 86 orang siswa atau 90%, responden siswa yang menyatakan kurang baik dalam implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar penilaian di SMAN adalah 6 orang siswa atau 6%.

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut:



Diagram 14 Kesiapan Standar Penilaian Pada SMAN Di Kabupaten Sidoarjo Respon Guru

PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo

1. Standar Proses

Berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dalam persekoran, jumlah responden kepala sekolah yang menyatakan sangat baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar proses pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 6 orang kepala sekolah atau 100%. Jumlah responden guru yang menyatakan baik mengenai implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar proses pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 24 orang guru atau 100%. Jumlah responden siswa yang menyatakan sangat baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian

standar proses pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 5 orang siswa atau 5%, responden siswa yang menyatakan sangat baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar proses pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 80 orang siswa atau 83%, responden siswa yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar proses pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 11 orang siswa atau 11%.

Dapat disimpulkan implementasi sistem kredit semester ditinjau dari standar proses pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo ini sudah baik, karena guru mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan Permendikbud kemudian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, perangkat pembelajaran yang digunakan juga beragam seperti RPP, Promes, analisis KI/KD, rangan penilaian, kriteria ketuntasan minimal. Hal ini sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendinas) No. 65 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran

2. Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dalam pensekoran, Responden kepala sekolah yang menyatakan sangat baik mengenai implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo adalah 1 orang kepala sekolah atau 17%, responden kepala sekolah yang menyatakan baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 3 orang kepala sekolah atau 50%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%. Jumlah responden guru yang menyatakan baik mengenai implementasi sistem kredit semester ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo adalah 15 orang guru atau 63%, responden guru yang menyatakan kurang baik adalah 9 orang guru atau 37%.

Jumlah responden siswa yang menyatakan sangat baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 6 orang siswa atau 6%, responden siswa yang menyatakan baik adalah 69 orang siswa atau 72%, responden siswa yang menyatakan kurang baik mengenai

implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 21 orang siswa atau 22%.

Dapat disimpulkan implementasi sistem kredit semester ditinjau dari standar sarana dan prasarana pada SMA di Kabupaten Sidoarjo ini sudah baik, karena sekolah sudah memenuhi standar sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium dan lain-lain dengan baik hanya saja di beberapa kelas diisi peserta melebihi jumlah yang ditetapkan pemerintah yaitu maksimal 32 siswa per kelas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Permendiknas No. 24 tahun 2007 yang menyatakan bahwa sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki sarana prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang pemimpin, ruang guru, ruang tata usaha, ruang beribadah, ruang konseling, uks, ruang organisasi kesiswan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, ruang tempat beribadah dan tempat bermain.

3. Standar Pendidik

Berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dalam pensekoran, jumlah responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pendidik pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 4 orang kepala sekolah atau 67%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pendidik pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%. Jumlah responden guru yang menyatakan baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester ditinjau dari ketercapaian standar pendidik pada SMA di Kabupaten Sidoarjo SMAN adalah 16 orang guru atau 67%, responden guru yang menyatakan kurang baik adalah 8 orang guru atau 33%.

Disimpulkan implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pendidik pada SMA di Kabupaten Sidoarjo sudah baik karena jumlah guru relevan dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam standar, sebagian besar guru menguasai materi. Jumlah guru SMA di Kabupaten Sidoarjo yang sudah sertifikasi adalah 100% kecuali guru GTT, bahkan guru di beberapa sekolah yang menjadi narasumber tingkat nasional maupun provinsi, dan ada guru yang menjadi instruktur. Ada guru di beberapa sekolah yang belum mengenal SKS dikarenakan kurangnya sosialisasi sekolah mengenai Sistem Kredit Semester. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan SKS di SM/MTS dan SMA /MA dalam buku panduan yang dikeluarkan BSNP (2010: 6) yang

menyatakan bahwa sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.

4. Standar Biaya Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dalam pensekoran, jumlah responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar biaya pendidikan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 4 orang kepala sekolah atau 67%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar biaya pendidikan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 2 orang kepala sekolah atau 33. Jumlah responden guru yang menyatakan baik implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar biaya pendidikan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 18 orang guru atau 75%, responden guru yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar proses pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 6 orang guru atau 25%.

Standar biaya pendidikan ini diperoleh karena bantuan yang diberikan bagi peserta didik miskin adalah pembebasan kemampuan iuran, perumusan anggaran sekolah merujuk pada peraturan pemerintah dengan dikomunikasikan kepada komite dan pemangku kepentingan. Tambahan pembiayaan sekolah melalui penggunaan eksternal salah satu aspek dalam sumber daya atau prasarana. Sekolah membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan khususnya orang tua murid untuk mendapat bantuan biaya. Hal ini sesuai dengan teori Sulistyoningrum (2010:4) yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

5. Standar Pengelolaan

Berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dalam pensekoran, jumlah responden kepala sekolah yang menyatakan sangat baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan di SMA adalah 2 orang kepala sekolah atau 33%, responden kepala sekolah yang menyatakan baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 3 orang kepala sekolah atau 50%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 1 orang kepala sekolah atau 17%. Jumlah responden guru yang menyatakan

sangat baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan pada SMAN di Kabupaten Sidoarjo adalah 3 orang guru atau 12.5%, responden guru yang menyatakan baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 15 orang guru atau 62.5%, responden guru yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar pengelolaan pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 6 orang guru atau 25%.

Standar pengelolaan ini diperoleh karena penyusunan rencana kerja sekolah dilakukan dengan cara mempertimbangkan masukan dari komite sekolah, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dilakukan setiap 4 tahun sekali, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dilakukan setiap tahun. Pemenuhan terhadap indikator yang telah ditetapkan melalui NSP dilakukan melalui pelaksanaan pengelolaan yang afektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pedoman berupa Permendiknas No. 19 tahun 2007 yang menyatakan bahwa standar pengelolaan memberikan arahan kepada satuan untuk dapat melaksanakan pengelolaan dengan baik, beberapa komponen yang terdapat pada pedoman tersebut diantaranya perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah, dan pemanfaatan sistem informasi manajemen.

6. Standar Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dalam pensekoran, jumlah responden kepala sekolah yang menyatakan baik dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar penilaian di SMA adalah 5 orang kepala sekolah atau 83%, responden kepala sekolah yang menyatakan kurang baik adalah 1 orang kepala sekolah atau 17%. Jumlah responden guru yang menyatakan baik dalam mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar penilaian pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 19 orang guru atau 79%, responden guru yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar penilaian pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 5 orang guru atau 21%. Jumlah responden siswa yang menyatakan sangat baik mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar penilaian pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 4 orang siswa atau 4%, responden siswa yang menyatakan baik adalah 86 orang siswa atau 90%, sedangkan responden siswa yang menyatakan kurang baik mengenai implementasi

Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian standar penilaian pada SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah 6 orang siswa atau 6%.

Disimpulkan standar penilaian pada SMA di Kabupaten Sidoarjo sudah baik, karena dalam merancang penilaian, guru di sekolah menggunakan pedoman penilaian, kriteria ketuntasan nilai, pedoman penskoran, petunjuk tentang pengelolaan nilai, KKM, Penilaian yang dilakukan guru disekolah sudah sesuai dengan standar penilaian SKS. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No.66 tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam penilaian yang harus diperhatikan salah satunya perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip-prinsip penilaian.

B. Kendala Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan terdapat kendala yang ditemukan pada implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah yaitu kurangnya jumlah kelas yang ada saat ini belum mencapai 150% dari rombongan yang ada sehingga *moving class* tidak bisa diterapkan. Pada sistem kredit semester (SKS) diperlukan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik lebih aktif seperti sistem belajar kelas bergerak (*moving class*). Hal ini sesuai dengan panduan penyelenggaraan sistem kredit semester untuk sekolah menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyebutkan bahwa konsep sistem kredit semester adalah seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Hasil penelitian implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo adalah baik. Hal ini ditunjukkan dari 6 Standar Nasional Pendidikan yang digunakan yaitu standar proses memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 82% dari 104 orang responden, karena perangkat pembelajaran sudah terpenuhi di semua kelas. Standar sarana dan prasarana memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 68% dari 87 orang responden, karena sekolah sudah memenuhi standar ukuran ruang, jumlah ruang, dan persyaratan untuk ventilasi sesuai dengan standar yang

dikeluarkan oleh pemerintah. Standar pendidik memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 67% dari 20 orang responden, karena guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pengalaman belajar dengan kualitas tinggi bagi semua peserta didik. Standar biaya pendidikan memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 80% dari 22 orang responden, karena rancangan anggaran biaya pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dirumuskan merujuk pada peraturan pemerintah dan dengan melibatkan komite sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan. Standar pengelolaan memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 60% dari 18 orang responden karena penyusunan perencanaan program sekolah berdasarkan kesepakatan dewan guru, masyarakat, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Standar penilaian memenuhi kriteria baik, dengan mendapat nilai terbanyak dari responden yaitu 87% dari 110 orang responden karena guru disekolah menggunakan berbagai jenis metode untuk menilai kemajuan peserta didik secara berkelanjutan baik formal maupun non formal.

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap kendala dalam implementasi SKS ditinjau dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada SMA di Kabupaten Sidoarjo yaitu pada Standar sarana dan prasarana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah
Diharapkan kepada sekolah yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk memenuhi standar sarana dan prasarana, khususnya jumlah ruang kelas sehingga *moving class* dapat diterapkan karena, pada Sistem Kredit Semester (SKS) diperlukan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik lebih aktif seperti sistem belajar kelas bergerak (*moving class*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka.
- Baktiarso, Singgih. 2015. *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: laksana Presindo.
- BSNP. 2010. Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.(online).(Bsnp-indonesia.org/id/wp-content/up:oads/2010/06/panduan-SKS-SMP.pdf).
- Depdiknas. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

- (SMA/MA). (online).
(<http://staff.unila.ac.id/radangunawan/files/2011/09/Permendiknas-No-24-tahun2007.pdf>).
- Depdiknas. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tentang Standar Penilaian Pendidikan.(online).(http://sipma.ui.id/files/dokumen/U_SNP_SN%20PT/PP%20SNP/PP0322013_SNP.pdf)
- Depdiknas . 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66. (online).
(<http://biologi.fkip.uns.ac.id/wpcontent/uploads/2013/08/PDK-2013-66-Standar-Penilaian.pdf>)
- Depdiknas. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. (online). (<http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/03.-A.-Salinan-Permendikbud-No.-65-th-2013-ttg-Standar-Proses.pdf>)
- Depdiknas. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (Online).
(<http://www.slideshare.net/wincibal/permendibud-tahun2014-nomor158-sks-pd-dikdasmn>).
- Hamalik, Oemar. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sulistiyoningrum, Nining. 2010. Standar Pembiayaan Pendidikan. (online).
(<http://niningsulistiyoningrum.word.com/2010/05/standar-pembiayaan-pendidikan>)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

